

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Desentralisasi Fiskal terhadap Fiscal Stress pada Kabupaten/Kota di Sumatera

Miskah Azzahra

Prodi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang
Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang 30128, Indonesia
mhareal612@gmail.com

Kiagus Zainal Arifin

Prodi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang
Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang 30128, Indonesia
zainalarifin0413@gmail.com

Yevi Dwitayanti

Prodi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang
Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang 30128, Indonesia
yevi_dwitayanti@polsri.ac.id

Article's History:

Received 12 Agustus 2023; Received in revised form 15 September 2023; Accepted 21 September 2023; Published 1 Oktober 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset).

Suggested Citation:

Azzahra, M., Arifin, K. A., & Dwitayanti, Y. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Desentralisasi Fiskal terhadap Fiscal Stress pada Kabupaten/Kota di Sumatera. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9 (5). 2243-2254. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1595>

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Desentralisasi Fiskal terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Periode 2019 – 2021. Sampel penelitian ini terdiri dari 17 Kabupaten dan 25 Kota di Sumatera periode 2019 – 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, sehingga pengujian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Alat yang digunakan untuk pengujian dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap *fiscal stress*, belanja modal berpengaruh terhadap *fiscal stress*, dan desentralisasi fiskal terhadap *fiscal stress*.

Keywords: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Desentralisasi Fiskal, dan *Fiscal Stress*

Pendahuluan

Adanya suatu sistem yang baru diterapkan karena adanya pertimbangan dalam memenuhi tuntutan dalam masyarakat, atau karena sistem baru tersebut dipandang lebih efisien. Salah satu sistem yang dipandang cukup efisien yaitu desentralisasi. Desentralisasi merupakan wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah daripada pemerintah pusat. Desentralisasi atau sering dikenal juga dengan otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat serta memudahkan pengawasan dari masyarakat. Namun, setiap daerah memiliki cara penerapan desentralisasi yang berbeda-beda sehingga hal ini harus diperhitungkan.

Desentralisasi sudah mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama kali diterapkan melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya desentralisasi atau otonomi daerah dapat memberikan peluang kepada pemerintah daerah agar dapat mengoptimalkan potensi-potensi di daerahnya. Namun, menurut Abidin (2016) setiap daerah memiliki spesifikasi yang berbeda-beda dengan daerah lainnya dan berbeda dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, ada pemerintah daerah yang tidak memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya. Hal ini menimbulkan ketergantungan lebih terhadap pemerintah pusat. Dengan begitu kebijakan ini dapat memberatkan beberapa daerah yang tidak memiliki kemampuan dalam

mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan di daerahnya guna membiayai belanja daerah. Sehingga pada akhirnya hal ini dapat menimbulkan tekanan fiskal atau *fiscal stress* (Muryawan dan Sukarsa, 2016).

Tingginya *fiscal stress* dapat berpengaruh terhadap tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan begitu pemerintah daerah didorong untuk melakukan terobosan-terobosan demi membiayai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik (Junita dan Abdullah, 2016). Salah satu bentuk usaha pemerintah adalah meningkatkan penerimaan pajak guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Usaha meningkatkan pendapatan daerah ini dilakukan untuk menutupi belanja daerah yang cenderung meningkat setiap tahunnya (Lhutfi dkk., 2020). Mengingat akan lebih banyaknya perubahan pembiayaan yang diakibatkan adanya tuntutan dari masyarakat, apabila pendapatan daerah tidak dapat mencukupi untuk membiayai belanja daerah maka akan berdampak pada timbulnya *fiscal stress* (Muda, 2012). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *fiscal stress* terjadi karena adanya defisit anggaran atau adanya pengeluaran yang lebih besar daripada pennerimaannya.

Di tahun 2004 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini ditujukan untuk membantu mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dengan daerah lainnya. Namun, dalam menjalankan sistem otonomi daerah, pemerintah daerah harus berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dan meminimalkan ketergantungan penerimaan dari pemerintah daerah. Dan pada kenyataannya, berdasarkan perhitungan perbandingan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan khususnya pada provinsi-provinsi di Sumatera tahun 2021 menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan dana perimbangan masih lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerahnya (Direktoral Jenderal Perimbangan Keuangan, 2021). Hasil perhitungan tersebut disajikan pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Perbandingan PAD dan Dana Perimbangan pada Provinsi di Sumatera Tahun 2021

Provinsi	%PAD	%Dana Perimbangan
Nanggroe Aceh Darussalam	-2,52%	81,95%
Sumatera Utara	15,76%	53,57%
Sumatera Selatan	14,59%	59,43%
Sumatera Barat	13,11%	60,73%
Bengkulu	38,19%	67,71%
Riau	21,52%	56,75%
Kepulauan Riau	15,07%	63,17%
Jambi	20,08%	60,94%
Lampung	14,33%	56,25%
Bangka Belitung	31,07%	64,61%

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (diolah peneliti, 2023)

Seperti yang tersaji pada tabel di atas bahwa dana perimbangan memiliki tingkat yang lebih tinggi dibanding pendapatan asli daerah pada provinsi-provinsi di Sumatera untuk tahun 2021. Hal ini dapat diindikasikan bahwa provinsi-provinsi tersebut masih memiliki tingkat kemandirian yang rendah dan masih bergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat. Dengan begitu, apabila tidak ada perimbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah tidak dapat mencukupi pembiayaan belanja daerah sehingga dapat menimbulkan fenomena *fiscal stress*. Sebelumnya penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi *fiscal stress* dilakukan oleh peneliti Puspitorini dan Lenggogeni, (2022) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap *fiscal stress*. Masih menurut peneliti yang sama, menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*. Hal ini tentu saja bertolak belakang terhadap teori yang menyatakan apabila pendapatan asli daerah meningkat, maka *fiscal stress* akan menurun. Begitu pula sebaliknya. Sehingga penelitian kali ini bertujuan untuk menemukan pengaruh secara parsial dan simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap *fiscal stress* dengan objek penelitian pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera.

Tinjauan Pustaka

Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori Peacock dan Wiseman (1961), mengemukakan bahwa pemerintah daerah berusaha untuk menemukan sumber-sumber pendapatan, misalnya pajak. Biaya pungutan pajak yang meningkat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang cenderung meningkat. Namun, hal tersebut tidak disukai oleh masyarakat karena biaya pajak yang meningkat. *Gross National Bruto (GNP)* atau Produk Nasional Bruto (PDB) dalam keadaan normal pun akan meningkat. Hal ini menyebabkan penerimaan pemerintah pun semakin tinggi seiring meningkatnya pengeluaran pemerintah. Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah, pemerintah memanfaatkan penerimaan pajak sebagai alternatif. Hal ini menimbulkan suatu kondisi yang disebut *displacement effect* atau efek pergantian. *Displacement effect* adalah suatu gangguan sosial yang menyebabkan dialihkannya aktivitas swasta pada aktivitas pemerintah. Di sisi lain, karena masyarakat tidak mampu membayar biaya pajak yang tinggi, pemerintah daerah pun tidak dapat meningkatkan pengeluarannya. Dengan penerimaan yang terbatas dan pengeluaran yang terus meningkat tersebut dapat menimbulkan keadaan *fiscal stress* (Ulfa Q. dkk., 2021)

Fiscal Stress

Muryawan (2014) menyatakan bahwa tekanan fiskal (*fiscal stress*) merupakan suatu keadaan yang disebabkan adanya keterbatasan penerimaan anggaran pemerintah daerah guna membiayai pembangunan dan meningkatkan kemandirian daerah. Umumnya, *fiscal stress* disebabkan adanya keterbatasan penerimaan disuatu daerah. Seiring dengan sistem otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menemukan potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah. Namun pada kenyataannya, masih banyak daerah yang sumber pendapatannya masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah serta masih rendahnya tingkat kemandirian suatu daerah. Daerah-daerah yang tidak memiliki kesiapan ekonomi di era otonomi daerah cenderung mudah mengalami tekanan fiskal atau *Fiscal stress*.

Dalam Dwitayanti (2019) menyebutkan ada 3 pengelompokan penyebab terjadinya *fiscal stress*, antara lain: 1) kondisi pertumbuhan ekonomi yang menurun dan mengalami resesi dapat menyebabkan *fiscal stress*. 2) Adanya penurunan perangsang suatu bisnis dan industri. 3) *Fiscal stress* sebagai fungsi politik dan faktor-faktor keuangan yang tak terkendali.

Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285 Ayat 1, menjelaskan "Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah." Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan dari daerah itu sendiri (Rupilu dkk., 2023). Menurut Nanga (2015), *fiscal stress* dapat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari daerah sendiri lebih besar, maka semakin besar pula tingkat kemandirian daerah tersebut. Pendapatan asli daerah yang meningkat merupakan suatu indikator upaya suatu daerah untuk menjadi mandiri dalam hal ekonomi.

Belanja Modal

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, "belanja modal adalah anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi". Belanja modal merupakan pembentukan modal pemerintah dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan belanja dalam bentuk fisik lain. Oleh sebab itu, belanja mesin, kendaraan, atau sejenisnya yang dimaksudkan untuk masyarakat tidak dapat dikategorikan ke dalam belanja modal. Pada dasarnya belanja modal merupakan pembentukan aset tetap dalam akuntansi pemerintah, karena belanja-belanja seperti hibah dan bantuan sosial (serupa dengan aset tetap) tidak dapat dikategorikan ke dalam belanja modal atau belanja barang.

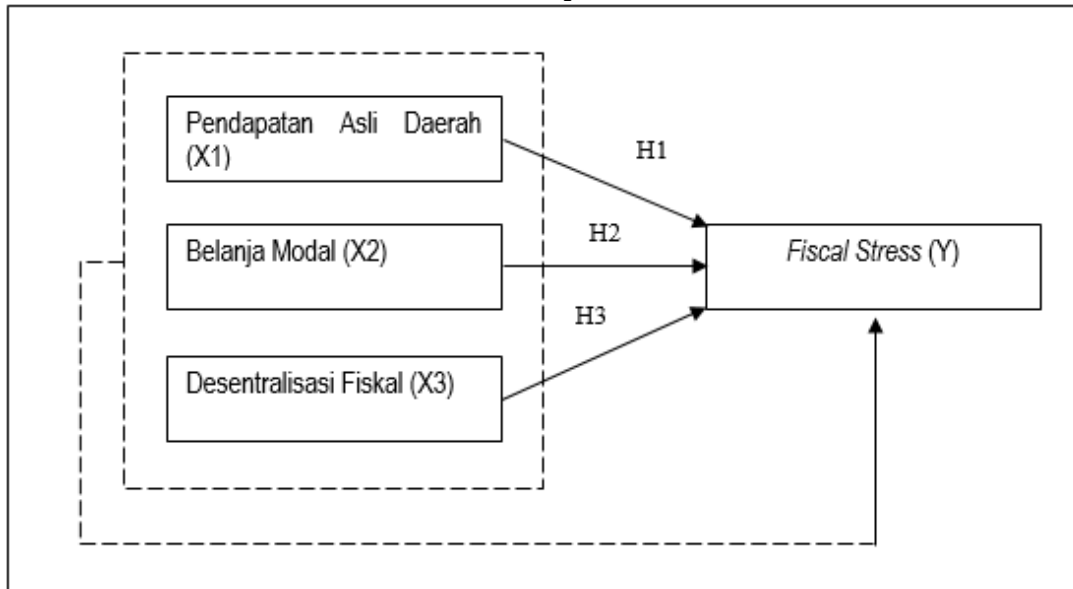
Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan Kajian Ekonomi Keuangan (2009 : 52), mendefinisikan "desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang fiskal kepada daerah yang meliputi *self financing* atau *cost recovery* dalam pelayanan publik dalam bentuk retribusi daerah, *cofinancing* atau *coproduction* yaitu dalam bentuk retribusi kontribusi

kerjasama atau pembayaran jasa, transfer dari pusat ke daerah, dan kebebasan daerah untuk melakukan pinjaman". Dalam desentralisasi fiskal, pengelolaan daerah yang semulanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat menjadi berpindah kepada pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah yang tidak pernah dilakukan sebelumnya (Adriana dkk., 2017).

Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah penulis, 2023

Hipotesis

Menurut Ichi dkk. (2021), pendapatan asli daerah diperoleh atas penerimaan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap pemerintah daerah berusaha untuk menggali potensi-potensi pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Selain itu, adanya pendapatan asli daerah dapat membantu meningkatkan kemandirian fiskal di daerah agar tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat. Apabila pendapatan di suatu daerah lebih besar dibandingkan belanja daerah, maka akan mengurangi risiko terjadinya *fiscal stress*. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesisnya adalah:

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*.

Ichi dkk., (2021) menyatakan bahwa belanja modal merupakan salah satu indikator pengeluaran pemerintah, apabila tingkat belanja modal tinggi maka pengeluaran pemerintah akan tinggi pula. Dan dapat disimpulkan juga bahwa apabila belanja modal tidak diiringi dengan pertumbuhan pendapatan yang pesat akan berisiko terjadinya *fiscal stress*. Sehingga hipotesis yang diusulkan adalah:

H₂: Belanja Modal berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*.

Menurut Mardiasmo (2018), desentralisasi fiskal berdampak pada hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan. Sumber-sumber pendanaan berupa daerah maupun perimbangan daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi adanya ketimpangan antar daerah dengan daerah lainnya ataupun antar daerah dengan pusat. Hipotesis yang diusulkan adalah:

H₃: Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*.

Secara bersama-sama pendapatan asli daerah, belanja modal, dan desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Sehingga hipotesisnya adalah:

H4: Pedapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*.

Metodologi

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik atau sistem angka.

Variabel Penelitian

Tabel 2. Operasional Variabel

No	Nama Variabel	Indikator	Skala
1	Pendapatan Asli Daerah (X1)	$PAD = \frac{\text{realisasi PAD}}{\text{anggaran PAD}}$	Rasio
2	Belanja Modal (X2)	$BM = \frac{\text{realisasi BM}}{\text{anggaran BM}}$	Rasio
3	Desentralisasi Fiskal (X3)	$DF = \frac{\text{realisasi DF}}{\text{anggaran DF}}$	Rasio
4	<i>Fiscal Stress</i> (Y)	$FS = \text{Pendapatan Daerah} - \text{Belanja Daerah}$	Rasio

Sumber: diolah oleh peneliti, 2023

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2019 – 2021. Kriteria sampel yang digunakan dalam penarikan sampel adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota di Sumatera yang memiliki publikasi Laporan Hasil Pemeriksaan berturut-turut dari tahun 2019 – 2021.
2. Kabupaten/Kota di Sumatera yang pernah mengalami LRA negatif dalam kurun tahun 2019 – 2021.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu dengan mencari, mengumpulkan, mengklasifikasikan data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menyajikan nilai maksimum, minimum, dan rata-rata. Nilai maksimum dan minimum menunjukkan nilai maksimum dan minimum yang digunakan untuk memperkirakan rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Sehingga statistik deskriptif diperlukan untuk mendeskripsikan seluruh sampel yang dikumpulkan berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut Lupiyoadi dan Ikhsan (2015), “uji normalitas adalah uji distribusi data yang akan dianalisis, apakah penyebarannya normal atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam analisis parametrik.” Untuk menentukan data apakah berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat dengan menggunakan histogram residual

atau menggunakan *scatter plot*. Namun, untuk hasil yang lebih akurat dapat menggunakan 2 pendekatan berikut: yaitu 1) Rasio Skewness dan rasio Kurtosis, 2) Uji Kormogorov-Smirnov.

Adapun batasan data disebut berdistribusi normal apabila menggunakan rasio Skewness dan rasio Kurtosis adalah berada antara -2 hingga +2. Sedangkan apabila menggunakan uji Kormogorov-Smirnov, data disebut berdistribusi normal apabila nilai signifikansi di atas 5% atau 0,05.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan keadaan ketika terjadi korelasi atau hubungan yang kuat di antara variabel bebas yang disertakan dalam pembentukan model regresi linear (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015). Adanya multikolinearitas menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Itu berarti standar *error* besar, sehingga berakibat pada saat uji koefisien, t_{hitung} akan lebih kecil dari t_{tabel} . Untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas dapat dilihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factors (VIF)* variabel bebas yang digunakan dalam penelitian. Apabila nilai *Tolerance* < 0,10 dan *VIF* > 10 maka data terbebas dari gejala multikolinearitas. (Ghozali, 2016).

3. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan linear antara *error* serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Untuk mendeteksi apakah data memiliki gejala autokorelasi adalah dapat menggunakan uji Durbin-Watson. Berikut ini adalah ketentuan apakah data terbebas dari autokorelasi atau tidak (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015):

- $dw < dl$, berarti autokorelasi positif
- $dw > (4-dl)$, berarti autokorelasi negatif
- $du < dw < (4-dl)$, berarti tidak terdapat autokorelasi
- $dl < dw < du$ atau $(4-du)$, berarti tidak dapat disimpulkan

4. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas merupakan gejala dengan variasi residual yang tidak sama dari satu observasi dengan observasi lain. Variasi residual harus bersifat homokedastisitas atau observasi satu dengan yang lainnya sama agar model lebih akurat (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015). Secara statistik variabel bebas dikatakan tidak signifikan apabila > 0,05. Sehingga semakin tidak signifikan variabel bebas dapat disimpulkan bahwa data sudah terbebas dari gejala heterokedastisitas.

Pengujian Hipotesis

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = *Fiscal Stress*

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

e = *error*

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Belanja Modal

X_3 = Desentralisasi Fiskal

2. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Semakin besar nilai koefisien determinasi, maka model persamaan regresi semakin baik.

3. Uji F

Menurut Ghozali (2016), uji statistik F bertujuan menunjukkan apakah sebuah variabel bebas yang dimasukkan akan memiliki pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel terikat, atau tidak.

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Berikut ini adalah hasil uji analisis deskriptif dari penelitian ini dengan variabel independen pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dengan variabel dependen *fiscal stress*. Pengujian ini menggunakan bantuan *software SPSS Version 25*.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_PAD	93	0,10	4,62	0,9315	0,46160
X2_BM	93	0,40	1,14	0,8605	0,11344
X3_DF	93	0,01	1,63	0,1611	0,18471
Y_FS	93	0,08	0,18	0,1485	0,02032
Valid N (listwise)	93				

Sumber: Output SPSS 25

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4. Uji *One-Sample* Kormogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		93
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,02268078
Most Extreme Differences	Absolute	0,087
	Positive	0,056
	Negative	-0,087
Test Statistic		0,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,078 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Output SPSS 25

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada nilai residual dari uji normalitas di atas dengan menggunakan pendekatan Kormogorov-Smirnov adalah sebesar $0,078 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual tersebut sudah normal. Model regresi dapat yang digunakan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *fiscal stress* berdasarkan masukan variabel independen (pendapatan asli daerah, belanja modal, dan desentralisasi fiskal).

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
Pendapatan Asli Daerah_X1	0,872	1,147
Belanja Modal_X2	0,873	1,146
Desentralisasi Fiskal_X3	0,996	1,004

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 5 di atas, menunjukan nilai *tolerance* pada variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai sebesar $0,872 > 0,10$, belanja modal sebesar $0,873 > 0,10$, dan desentralisasi fiskal sebesar $0,996 > 0,10$. Lalu, nilai *VIF* pada variabel pendapatan asli daerah sebesar $1,147 < 10$, belanja modal sebesar $1,146 < 10$, desentralisasi fiskal < 10 . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel penelitian terbebas dari gejala multikolinearitas karena nilai *tolerance* lebih dari 0.10 (10%) dan nilai *VIF* lebih besar dari 10. Sehingga variabel-variabel tersebut dapat digunakan untuk memprediksi *fiscal stress* selama periode penelitian.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Uji Durbin-Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,887 ^a	0,893	0,893	0,00011	2,123

Sumber: Output SPSS 25

Pada tabel 6 diketahui nilai Durbin-Watson (DW) melalui *model summary* sebesar 2,123, dengan nilai du berdasarkan nilai *table* sebesar 1,7295. Berdasarkan model $du < dw < 4 - du$ atau $1,7295 < 2,123 < 2,2705$, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sudah terbebas dari autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 7. Uji Glejser

Model	Signifikansi
Pendapatan Asli Daerah_X1	0,436
Belanja Modal_X2	0,090
Desentralisasi Fiskal_X3	0,442

Sumber: Output SPSS 25

Tabel 7 menunjukan hasil pengujian heterokedastisitas dengan menggunakan Uji Glejser. Berdasarkan tabel tersebut menunjukan bahwa nilai Signifikansi pada variabel pendapatan asli daerah sebesar $0,436 > 0,05$, belanja modal sebesar $0,090 > 0,05$, dan desentralisasi fiskal sebesar $0,442 > 0,05$. Dikarenakan nilai-nilai tersebut sudah lebih besar dari 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya gejala heterokedastisitas pada model regresi penelitian ini.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,161	0,000		132,453	0,000
	X1_PAD	0,002	0,000	0,668	71,531	0,000
	X2_BM	0,003	0,000	0,295	31,692	0,000
	X3_DF	-0,005	0,000	-0,741	-85,168	0,000

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 8 di atas, persamaan regresi linear berganda antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan disajikan sebagai berikut.

$$FS = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 BM + \beta_3 DF + e$$

Keterangan:

FS : *Fiscal Stress*

PAD : Pendapatan Asli Daerah

BM : Belanja Modal

DF : Desentralisasi Fiskal

α : konstanta

β : koefisien determinasi

e : *error*

Berdasarkan tabel 8, berikut ini adalah persamaan regresi berganda pada penelitian ini:

$$Y = 1,161 + 0,668X_1 + 0,295X_2 + 0,741X_3 + e$$

Uji Koefisien

Berdasarkan tabel 6 di atas, hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R square* sebesar 0,893 yang berarti bahwa 89,3% besarnya *fiscal stress* dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Desentralisasi Fiskal. Sedangkan 10,7% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Penelitian ini memilih nilai dari Adjusted R Square untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen disebabkan penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel.

Uji F

Tabel 9. Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,000	3	0,000	439,104	0,000 ^b
	Residual	0,000	89	0,000		
	Total	0,000	92			

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 9 menghasilkan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $439,104 > 2,706$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel pendapatan asli daerah, belanja modal, dan desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress*

Hasil uji t menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap *fiscal stress*. Uji-t menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $71,531 > 1,986$. Dan nilai signifikansi $< 0,05$ atau $0,000 < 0,05$. Maka hipotesis pertama yang diajukan diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Puspitorini dan Lenggogeni (2022) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Dan hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian Dwitayanti dkk., (2019) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh terhadap *fiscal stress*.

Pendapatan asli daerah dapat dijadikan sebagai indikator kemandirian suatu daerah. Apabila tingkat kemandirian pemerintah daerah tinggi, maka dapat mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Pada dasarnya pendapatan asli daerah yang meningkat dapat menunjukkan bahwa daerah tersebut cukup mampu melakukan optimalisasi kinerja untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Secara teori, apabila di suatu daerah PAD terus meningkat maka kondisi *fiscal stress* dapat berkurang, karena keadaan *fiscal stress* menunjukkan keadaan daerah yang belum mampu melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Dan pada hasil penelitian ini pada kabupaten/kota di Sumatera mampu membuktikan teori tersebut.

Pengaruh Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress*

Hasil uji t menjelaskan bahwa belanja memiliki pengaruh terhadap *fiscal stress*. Uji-t menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $31,692 > 1,986$. Dan nilai signifikansi $< 0,05$ atau $0,000 < 0,05$. Maka hipotesis kedua yang diajukan diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Ichi dkk., (2021) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap *fiscal stress*. Dan penelitian ini menyanggah hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwitayanti dkk., (2019) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

Apabila daerah memiliki tingkat belanja modal yang tinggi biasanya akan diikuti dengan total belanja daerah yang tinggi pula. Dengan belanja modal yang tinggi dapat memungkinkan suatu daerah mengalami keadaan *fiscal stress*. Hal tersebut berlaku pada penelitian ini yang dapat dibuktikan dengan tingkat belanja modal yang tinggi pada kab/kota di Sumatera. Misalnya saja Kota Padang di tahun 2019 yang memiliki belanja modal sebesar Rp. 491.009.055.949,84 yang lebih tinggi dari tahun berikutnya 2020 yaitu sebesar Rp. 304.791.752.148,61. Dan pada tahun 2019 tersebut diikuti dengan adanya keadaan *fiscal stress* di kota Padang, hal tersebut dapat disebabkan tingginya belanja modal di Kota Padang tahun 2019.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap *Fiscal Stress*

Hasil uji t menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh terhadap *fiscal stress*. Uji-t menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $85,168 > 1,986$. Dan nilai signifikansi $< 0,05$ atau $0,000 < 0,05$. Maka hipotesis ketiga yang diajukan diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Ichi dkk., (2021) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah masih banyak pemerintah yang bergantung pada pemerintah pusat dalam hal sumber pendapatan daerah. Dana perimbangan merupakan dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna membiayai kelebihan belanja daerah. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat dapat membantu menurunkan *fiscal stress* yang terjadi di daerah. Hal ini juga mengindikasikan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Karena dana perimbangan bukan berasal dari kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi pendapatan daerah, melainkan dari pemerintah pusat dengan ditentukan berdasarkan bobot urusan pemerintah yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Dalam penelitian ini dapat dicontohkan pada Kota Prabumulih di tahun 2020 yang menerima dana transfer sebesar Rp. 859.882.828.238,68 yang diikuti dengan LRA negatif sebesar Rp. 51.788.644.732,27. Kemudian di tahun berikutnya, dana transfer meningkat menjadi Rp. 902.476.004.563,08 dan

diikuti dengan tingkat *fiscal stress* yang menurun. Hal ini dapat membuktikan bahwa desentralisasi fiskal dapat mempengaruhi *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Sumatera.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Desentralisasi Fiskal terhadap *Fiscal Stress*

Hasil uji-F menjelaskan bahwa secara simultan pendapatan asli daerah, belanja modal, dan desentralisasi fiskal memiliki pengaruh terhadap *fiscal stress*. Uji-F menunjukkan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $439,104 > 2,706$. Dan nilai signifikansi $< 0,05$ atau $0,000 < 0,05$. Maka hipotesis keempat yang diajukan diterima.

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera.
2. Belanja Modal secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera.
3. Desentralisasi Fiskal secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera.
4. Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Desentralisasi Fiskal secara simultan memiliki pengaruh terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera.

Referensi

- Abdullah, S., & Junita, A. (2016). Bukti Empiris tentang Pengaruh Budget Ratcheting terhadap Hubungan antara Pendapatan Sendiri dan Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh. Vol. 28 No. 02 pp 185 – 201.
- Abidin, Said Zainal. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta Selatan. Salemba Empat. Edisi ke-3.
- Badan Pemeriksaan Keuangan. (2019). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Indonesia.
- _____. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Indonesia.
- _____. (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2018. Laporan Realisasi APBD. Indonesia.
- _____. (2019). Laporan Realisasi APBD. Indonesia.
- _____. (2020). Laporan Realisasi APBD. Indonesia.
- _____. (2021). Laporan Realisasi APBD. Indonesia.
- Dwitayanti, Yevi, Nurhasanah, dan Rosy Armaini. (2019). Determinan Fiscal Stress Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*. Vol.3 No.1 pp 68-78.
- Erlina, Omar Sakti Rambe dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan daerah Berbasis Akrua*. Jakarta Selatan. Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang. Universitas Diponegoro. Edisi ke-8.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi: Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Edisi ke-2.
- Hermawan, Asep dan Husna Leila Yusran. (2017). *Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*. Depok. Kencana.
- Hoesada, Jan. (2015). *Bunga Rampai: Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta. Salemba Empat. Buku ke-1.
- Icih, Asep Kurniawan, dan Rijal Fadillah. (2021). The Influence of Local Revenue, Capital Expenditure, Economic Growth of GDP, General Allocation Funds, Fiscal Decentralization and Diversification of Regional Income on Fiscal Stress. *Journal of Accounting for Sustainable Society*. Vol. 3 No. 2 pp 34-53.
- Indonesia. (2004). Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>.

- Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005>.
- Indonesia. (2006). Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>.
- Indonesia. (2011). Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/167662/permendagri-no-21-tahun-2011>.
- Indonesia. (2014). Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia. (2021). Standar Akuntansi Pemerintah.
- Lhutfi, Iqbal, Hamzah Ritchi dan Ivan Yudianto. (2020). Do the Growth of Original Local Government Revenues and the Growth of Capital Expenditure Affect Fiscal Stress. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Akuntansi dan Sistem Informasi*. Vol. 23 No. 1 pp 1-11.
- Lupiyoadi, Rambat, dan Ridho Bramulya Ikhsan. (2015). *Praktikum Metode Riset Bisnis*. Jakarta Selatan. Salemba Empat.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN. Edisi ke-3.
- Mangkoesebroto, Guritno. (2014). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta. BPFE-UGM. Edisi ketiga.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta. Andi.
- Masnila, Nelly. (2021). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Solok. Mitra Cendekia Media.
- Muda, I. (2012). Variabel yang Mempengaruhi Fiscal Stress pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*. Vol. 4 No. 1.
- Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan RI. (2009). *Kajian Ekonomi Keuangan*. Vol. 13 No. 01. ISSN: 1410-3249. Jakarta.
- Puspitorini, Dina dan Lenggogeni. (2022). Variables Affecting Fiscal Stress in Regency/City of Aceh Province 2016-2019 Period. *Budapest International Research and Critics Institute – Journal*. Vol. 5 No. 2 pp 16045-16057.
- Renyowijoyo, Muindro. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Mitra Wacana Media. Edisi ke-3.
- Rupilu, Wilsna, Euginia Hendrini P. Tanan dan Marthini Lakusa. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress*. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*. Vol. 4 No. 1.
- Sang, Muryawan Made, dan Made Sukarsa. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Fiscal Stress*, dan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol. 5 No.2 pp 229-252.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Ulfa Q., Marya. Haryadi, dan Muhammad Gowon. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Fiscal Stress di Provinsi Jambi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*. Vol. 6 No. 3 pp 189-198.